

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi ekonomi yang tinggi, salah satu sektor ekonomi yang berkembang pesat yaitu sektor usaha. Persaingan dalam sektor usaha ini juga tidak dapat dipungkiri, terutama persaingan oleh pelaku UMKM. Kehadiran UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) dianggap mampu dalam meratakan perekonomian di Indonesia hingga ke berbagai pelosok. Pemerintah terus berupaya untuk melakukan pengembangan terhadap UMKM di Indonesia.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Sektor ini tidak hanya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, tetapi juga menjadi penggerak utama dalam distribusi hasil pembangunan ekonomi. Menurut (Rosa et al., 2023), UMKM berkontribusi besar dalam memberikan solusi terhadap tantangan ekonomi, khususnya di masa pandemi, dengan menciptakan inovasi di berbagai sektor termasuk kuliner. Dalam konteks sektor kuliner makanan, UMKM memiliki potensi besar untuk meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian lokal dan nasional melalui inovasi produk, peningkatan daya saing, serta pemanfaatan teknologi digital (Utami, 2023).

Pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan pada tahun 2023 mencapai 5,05%, dengan subsektor penyediaan akomodasi dan makan minum menjadi salah satu penggerak utama. Sektor ini tumbuh sebesar 9,83% dalam

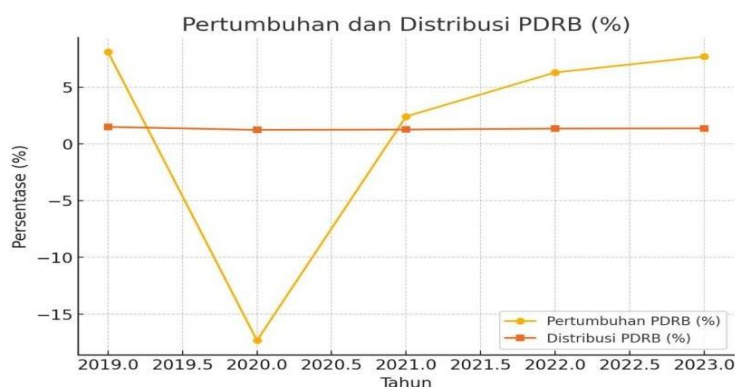
kontribusi terhadap konsumsi domestik, menunjukkan adanya potensi besar untuk pengembangan lebih lanjut, khususnya pada sektor UMKM kuliner di Kota Padang. Dukungan pemerintah dalam bentuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah tersedia, tetapi pemanfaatannya masih belum optimal karena kurangnya sosialisasi dan pelatihan terkait akses modal.

Berdasarkan data yang tersedia, kontribusi subsektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Data Kontribusi Sub Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sumatera Barat

Tahun	Pertumbuhan	Distribusi PDRB (%)
2019	8,11	1,50
2020	-17,33	1,24
2021	2,42	1,27
2022	6,30	1,35
2023	7,71	1,37

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, Laporan Perekonomian Provinsi Sumatera Barat 2023



Gambar 1.1
Data Kontribusi Sub Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sumatera Barat

Data di atas menunjukkan bahwa kontribusi subsektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2019 hingga 2023, terlihat adanya fluktuasi yang signifikan. Pada tahun 2019, kontribusi subsektor ini mencapai 1,50% dari total PDRB. Namun, pada tahun 2020, terjadi penurunan sebesar 17,33%, menurunkan kontribusi menjadi 1,24%. Penurunan ini kemungkinan besar disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 yang mempengaruhi sektor pariwisata dan layanan terkait.

Pada tahun 2021, subsektor ini mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan dengan pertumbuhan sebesar 2,42%, meningkatkan kontribusinya menjadi 1,27%. Pemulihan ini berlanjut pada tahun 2022, dengan pertumbuhan sebesar 6,30%, sehingga kontribusi mencapai 1,35%. Peningkatan ini mencerminkan adaptasi dan upaya pemulihan yang efektif dalam industri akomodasi dan makan minum pasca-pandemi.

Pada tahun 2023, subsektor ini terus menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan sebesar 7,71%, meningkatkan kontribusinya menjadi 1,37% dari total PDRB. Pertumbuhan ini menandakan pemulihan yang berkelanjutan dan potensi perkembangan lebih lanjut dalam industri ini.

Kota Padang sebagai salah satu pusat kuliner di Sumatera Barat membutuhkan pendekatan strategis untuk meningkatkan kontribusi sektor ini. Fokus pada peningkatan literasi keuangan, penyediaan pelatihan manajemen keuangan, dan perluasan akses modal dapat membantu pelaku UMKM kuliner mengatasi kendala mereka. Selain itu, evaluasi kebijakan pemerintah yang lebih

terarah dan distribusi yang merata sangat penting untuk memastikan pertumbuhan berkelanjutan sektor kuliner ini.

Sektor kuliner di Kota Padang memiliki potensi besar untuk dikembangkan lebih lanjut. Berdasarkan laporan (Rosa et al., 2022) Kecamatan Padang Barat memiliki lebih dari 371 UMKM kuliner aktif, menjadikannya salah satu pusat ekonomi kreatif di Kota Padang. Namun, sektor ini menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan literasi keuangan, akses modal yang terbatas, serta kebijakan yang belum sepenuhnya mendukung pertumbuhan usaha (Aulia et al., 2022) menyatakan bahwa literasi keuangan yang rendah sering kali menyebabkan pengelolaan keuangan yang tidak optimal, sehingga pelaku usaha sulit untuk mempertahankan dan mengembangkan bisnis mereka.

Penelitian menurut Syarif & Mulatsih (2023) mencatat bahwa Kota Padang memiliki 8.813 unit UMKM kuliner aktif, namun jumlah ini terus menurun akibat tantangan seperti pandemi COVID-19 dan keterbatasan akses pembiayaan. Survei Badan Pusat Statistik Sumatera Barat tahun 2023 menunjukkan bahwa 42,19% pelaku UMKM enggan mengajukan pembiayaan bank karena tingginya bunga, sementara 29,22% tidak berminat mendapatkan pembiayaan, dan 4,50% lainnya tidak memahami prosedur pengajuan pembiayaan. Penelitian tersebut juga mengungkap bahwa rendahnya pengetahuan keuangan, kurangnya keterampilan keuangan, dan modal sosial yang lemah menjadi penghambat utama akses pembiayaan bagi pelaku UMKM kuliner. Dengan literasi keuangan dan keterampilan yang lebih baik, pelaku usaha dapat meningkatkan kelayakan mereka di mata lembaga keuangan dan mendapatkan dukungan modal yang diperlukan.

Fenomena ini menunjukkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan komunitas UMKM untuk meningkatkan pengetahuan keuangan, menyediakan pelatihan keterampilan keuangan, serta memperluas akses pembiayaan dengan syarat yang lebih fleksibel. Sinergi ini tidak hanya akan mendukung keberlanjutan usaha kuliner tetapi juga memperkuat kontribusi sektor ini terhadap perekonomian Kota Padang.

Tidak hanya itu, dukungan dari sektor teknologi juga dapat memberikan dampak besar bagi UMKM kuliner. Menurut (Utami, 2023), penggunaan teknologi digital seperti platform *e-commerce* dan media sosial dapat membantu UMKM memperluas jangkauan pasar mereka secara signifikan. Namun, banyak pelaku UMKM yang masih kesulitan dalam mengadopsi teknologi ini akibat kurangnya literasi digital dan akses terhadap pelatihan.

Sebagai sektor yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian lokal, UMKM kuliner di Kota Padang memerlukan perhatian khusus untuk mengatasi berbagai kendala yang dihadapi. Pendekatan yang berbasis data dan kondisi lokal dapat menjadi kunci dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif. Misalnya, penelitian oleh (Aulia et al., 2022), menyebutkan bahwa pemetaan kebutuhan spesifik pelaku usaha dapat membantu pemerintah dan lembaga keuangan menyediakan solusi yang lebih tepat sasaran. Selain itu, kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, institusi pendidikan, dan lembaga keuangan dapat memperkuat ekosistem UMKM di Kota Padang.

Menurut Djou, 2019; Putri, 2020; Sabilla & Wijayangka, 2019 di dalam penelitian (Rosliyati & Iskandar, 2022). Pengelolaan keuangan menjadi suatu

masalah UMKM karena pemilik UMKM terhadap pengelolaan keuangan yang benar sesuai dengan kaidah-kaidah standar akuntansi yang berlaku. Hal ini biasanya muncul karena keterbatasan pengetahuan pengelola UMKM mengenai informasi pengelolaan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang baik. Pengelolaan keuangan menjadi salah satu aspek penting bagi kemajuan perusahaan. Pengelolaan keuangan dapat dilakukan melalui akuntansi. Akuntansi merupakan proses sistematis untuk menghasilkan informasi keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan bagi penggunanya. Sepanjang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) masih menggunakan uang sebagai alat tukarnya, akuntansi sangat dibutuhkan oleh UMKM tersebut.

Pengelolaan keuangan yang baik tentu akan berakibat terhadap kinerja (Aribawa, 2016) mengatakan bahwa kinerja UMKM dianalisis dengan menggunakan pendekatan yang didasarkan pada tiga asumsi, yaitu: 1). Pengukuran kinerja UMKM kerap sulit dilakukan secara kuantitatif, dikarenakan terbatasnya sumber daya (pemahaman keuangan dan tenaga kerja). 2). Pengukuran kinerja pada umumnya melihat indikator keuangan yang kompleks, sehingga hal ini tidak secara lengkap memperlihatkan kondisi aktual yang terjadi di bisnis tersebut. 3). Pengukuran kinerja yang kerap dipakai relatif hanya sesuai bila digunakan untuk perusahaan besar yang ter-struktur dalam manajemen perusahaannya. Dari hal tersebut maka digunakan pendekatan *non cost performance measures* yaitu pengukuran melalui persepsi untuk mengukur tingkat kinerja UMKM, baik kinerja keuangan maupun non keuangan.

Literasi keuangan memainkan peran penting dalam keberhasilan UMKM, terutama di sektor kuliner. Penelitian Rosa et al., (2023) menunjukkan bahwa literasi keuangan membantu pelaku UMKM dalam mengelola anggaran, membuat perencanaan keuangan, serta memahami berbagai sumber pembiayaan yang dapat digunakan untuk ekspansi usaha. Dalam penelitian (Utami, 2023), dijelaskan bahwa program-program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang didukung oleh pemerintah menjadi peluang besar untuk meningkatkan akses terhadap modal bagi UMKM kuliner. Namun, akses ini sering kali terhambat oleh rendahnya pemahaman pelaku UMKM mengenai produk keuangan yang tersedia.

Literasi keuangan merupakan faktor internal yang mempengaruhi kinerja UMKM. Menurut Aribawa, 2016 dalam penelitian (Wismanjaya & Werastuti, 2022) mengungkapkan bahwa sebagian besar para pelaku UMKM tidak melakukan pengelolaan keuangan dengan baik mereka cenderung mengelola keuangan usahanya tidak secara sistematis. Pelaku UMKM cenderung mencampurkan keuangan pribadi dengan keuangan usahanya, sehingga pengelolaan keuangannya tidak mendapatkan hasil yang maksimal.

Selain itu, akses modal menjadi kendala utama bagi banyak UMKM kuliner. Penelitian oleh (Saputri, 2023), menyoroti bahwa pelaku UMKM sering kali gagal memenuhi persyaratan administrasi perbankan, sehingga menghambat mereka dalam mendapatkan pembiayaan. Kebijakan inklusi keuangan yang dirancang untuk mengatasi hambatan ini perlu dioptimalkan agar dapat memberikan dampak signifikan bagi pelaku usaha kecil. Studi ini juga menyoroti pentingnya

pendampingan dan pelatihan bagi pelaku UMKM untuk memahami dan memanfaatkan produk keuangan yang tersedia.

Menurut Suardana & Musmini, 2020 dalam penelitian (Wismanjaya & Werastuti, 2022). Permasalahan akses permodalan kerap menjadi tantangan dalam perkembangan UMKM, di mana mereka menghadapi kesulitan dalam memperoleh dana akibat hambatan dalam aspek administrasi dan perizinan. Modal memiliki peran krusial dalam mendukung pertumbuhan usaha, sebab akses permodalan yang lebih mudah dapat mendorong pelaku usaha untuk berinovasi, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kinerja UMKM.

Kebijakan pemerintah yang efektif sangat diperlukan untuk mengatasi berbagai tantangan ini. Menurut (Redaksi, 2023) didalam artikel berjudul "Omzet UMKM Kota Padang Capai Rp1,3 Triliun," (2024), kontribusi sektor UMKM kuliner terhadap perekonomian Kota Padang sangat signifikan, namun tantangan seperti akses modal dan pelatihan literasi keuangan masih menjadi hambatan utama. Selain itu, (Setyo, 2025) mengungkapkan bahwa menurut Fauzan Ibnovi, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang, menegaskan bahwa pentingnya evaluasi dan pemerataan kebijakan untuk memastikan keberlanjutan usaha di sektor ini. Dalam konteks kebijakan yang berkeadilan, penguatan literasi keuangan dan akses pembiayaan perlu menjadi fokus utama pemerintah. Menurut (Supingah, 2024) Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) juga memprediksi bahwa sektor kuliner akan tumbuh hingga 7% pada tahun 2024, mencerminkan perlunya intervensi kebijakan yang lebih efektif untuk mendorong pertumbuhan ini.

Meskipun kebijakan pemerintah sudah banyak diarahkan untuk mendukung UMKM, tantangan dalam implementasi kebijakan masih sering ditemukan. Studi (Hendri S, 2021), menyoroti bahwa rendahnya sosialisasi program pemerintah dan keterbatasan infrastruktur menjadi hambatan signifikan bagi pelaku usaha kecil. Dalam konteks sektor kuliner, ini dapat memperlambat pertumbuhan usaha yang sangat bergantung pada distribusi bahan baku dan pemasaran produk. Selain itu, penelitian (Suriyanti & Binangkit, 2019) mengungkapkan bahwa strategi kebijakan yang kurang terarah sering kali mengurangi dampak positif dari intervensi pemerintah.

Berdasarkan uraian di atas, penting untuk mengeksplorasi lebih lanjut dampak literasi keuangan, akses modal, dan kebijakan pemerintah terhadap kinerja UMKM kuliner di Kota Padang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru mengenai langkah-langkah strategis yang dapat diambil untuk mendukung keberlanjutan UMKM kuliner sebagai sektor unggulan ekonomi lokal. Dengan memperkuat literasi keuangan, mempermudah akses modal, dan menyusun kebijakan yang tepat sasaran, sektor ini dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian lokal dan nasional.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai seberapa besar dampak literasi keuangan, akses modal, dan kebijakan pemerintah dengan judul “Studi tentang dampak literasi keuangan, akses modal, dan kebijakan pemerintahan terhadap kinerja UMKM kuliner makanan di Kota Padang”.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Masih minimnya tingkat literasi keuangan di kalangan pelaku UMKM sektor kuliner makanan di Kota Padang.
2. Terbatasnya pelatihan keuangan yang tersedia untuk UMKM di sektor kuliner makanan di Kota Padang.
3. Sulitnya akses terhadap modal bagi pelaku UMKM di sektor kuliner makanan di Kota Padang.
4. Ketidakstabilan pendapatan yang mempersulit pelaku usaha dalam merencanakan keuangan.
5. Kebijakan pemerintah yang belum merata sehingga belum menjangkau seluruh pelaku usaha secara adil.
6. Keterbatasan informasi mengenai sumber pembiayaan yang dapat diakses oleh UMKM.
7. Minimnya penerapan teknologi keuangan untuk meningkatkan literasi dan akses modal bagi UMKM.
8. Kurangnya dukungan jaringan usaha yang menghambat pertumbuhan serta akses ke informasi penting.
9. Lemahnya evaluasi kebijakan terhadap pengembangan UMKM sektor kuliner makanan.
10. Kurangnya sinergi antara kebijakan pemerintah, dukungan finansial, dan peningkatan literasi keuangan.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan agar penelitian ini terfokus dan terarah, maka penulis membatasi penelitian ini pada usaha makanan saji di Kota Padang. Variabel yang dikaji meliputi literasi keuangan (X1), akses modal (X2), dan kebijakan pemerintah (X3) sebagai variabel bebas, serta kinerja UMKM (Y) sebagai variabel terikat.

1.4 Rumusan Masalah

1. Bagaimana dampak Literasi Keuangan terhadap Kinerja UMKM kuliner makanan di Kota Padang?
2. Bagaimana dampak Akses Modal terhadap Kinerja UMKM kuliner makanan di Kota Padang?
3. Bagaimana dampak Kebijakan Pemerintah terhadap kinerja UMKM kuliner makanan di Kota Padang?
4. Bagaimana dampak literasi keuangan, akses modal, dan kebijakan pemerintah terhadap kinerja UMKM kuliner makanan di Kota Padang?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dampak Literasi Keuangan terhadap Kinerja UMKM kuliner makanan di Kota Padang.
2. Untuk mengetahui dampak Akses Modal terhadap Kinerja UMKM kuliner makanan di Kota Padang.
3. Untuk mengetahui dampak Kebijakan Pemerintah terhadap kinerja UMKM kuliner makanan di Kota Padang.

4. Untuk mengetahui dampak Literasi keuangan, Akses modal, dan Kebijakan Pemerintah terhadap kinerja UMKM kuliner makanan di Kota Padang.

1.6 Manfaat penelitian

1.6.1. Manfaat bagi UMKM kuliner makanan di Kota Padang

1. Membantu UMKM kuliner makanan di Kota Padang mengadopsi praktik keuangan yang lebih baik, meningkatkan stabilitas dan produktivitas.
2. Mengidentifikasi cara memperoleh modal serta mengatasi hambatan yang ada.
3. Membantu UMKM memanfaatkan kebijakan pemerintah yang mendukung pertumbuhan usaha.

1.6.2. Manfaat bagi penelitian terdahulu

1. Menambah referensi tentang pengaruh literasi keuangan, akses modal, dan kebijakan pemerintah terhadap UMKM kuliner makanan dengan fokus spesifik di Kota Padang.
2. Menyediakan data empiris terbaru yang relevan untuk evaluasi penelitian sebelumnya.

1.6.3. Manfaat bagi Akademik

1. Memperkaya literatur universitas terkait UMKM dan pengelolaan keuangan sektor kuliner makanan.
2. Menciptakan peluang kerja sama dengan pemerintah dan UMKM di Kota Padang.